

Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2013 dan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kab. Luwu Timur Dengan DPRD Kab.Luwu Timur Nomor 188.342/12/Prolegda-Hkm/XII/2012 dan Nomor 188.342/494/DPRD-LT/XII/2012 tentang Program Legislasi Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2013

No.	JUDUL RANPERDA	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD	SKPD TERKAIT
			BARU	UBAH			
1	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH	KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN ADALAH SEBAGIAN KEKAYAAN DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIPISAHKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENYERTAAN MODAL USAHA PADA BUMD	√		-PP NO 58 TAHUN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  -PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DPPKAD	BUMD
2	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING.	PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJANYA DLM WIL. KABUPATEN LUWU TIMUR	√		UU NO 28 NTHN 2009 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH -PP 97 THN 2012 TTG RETRIBUSI PENGENDALIAN LALI LINTAS DAN RETRIBUSI RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING	DINAS NAKERTRANS OS	DPPKAD
3	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	PENAMBAHAN JENIS PELAYANAN DAN TARIF LAYANAN		√	UU NO 28 THN 2009 TTG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	RSUD	
4	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	LPM, TP PKK KELURAHAN, RT DAN RW, KARANG TARUNA DAN LEMBAGA	√		-PP NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN -PERATURAN MENTERI	BAG.PEMERINTAHAN	BPMPD

		KEMASYARAKATAN LAINNYA.			DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN		
5	RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MALILI	- MENGGANTI PERATURAN DAERAH NO 32 TAHUN 2006 TTG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH IBUKOTA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2004-2014  - DASAR BAGI PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI		√	- UU NO 26 TAHUN 2007 TTG PENATAAN RUANG  -PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2011 TTG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TAHUN 2011-2031	TARKIM	BAPPEDA
6	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TTG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	PERUBAHAN SATPOL PP DAN KESBANGPOLINMAS		√  √	-PP NOMOR 6 TAHUN 2010 TTG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  - PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 40 TAHUN 2011 TTG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TTG LEMBAGA TEKNIS, BAPPEDA DAN INSPEKTORAT	BAGIAN ORG & KEPEG	SATPOL PP & KESBANGPOLI NMAS

7	LEMBAGA ADAT	<p>-DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN DAN MELESTARIKAN ADAT YANG ADA DI KAB.LUWU TIMUR,</p> <p>-PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT DALAM RANGKA MEMBINA, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI ADAT DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA YANG ADA DI KAB.LUWU TIMUR</p>	√	<p>-PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2007 TTG PEDOMAN FASILITAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH</p> <p>- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2007 TTG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT</p>	DPRD/SETWAN	DIKBUDPARM UDORA
8	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012	REALISASI APBD T.A 2012		UU NO 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA	DPPKAD	
9	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013	APBD PERUBAHAN T.A 2013		UU NO 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA	DPPKAD	
10	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014	APBD POKOK T.A 2014		UU NO 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA	DPPKAD	